

Judul : APBN untuk Pengentasan Kemiskinan
Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 15

APBN untuk Pengentasan Kemiskinan

Pada sidang kabinet paripurna APBN pertama 2023, 16 Januari lalu, Presiden Joko Widodo memberi arahan agar APBN tahun ini fokus pada kegiatan produktif. Utamanya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Upaya menurunkan kemiskinan menjadi perhatian khusus Presiden. Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebanyak 26,36 juta orang—naik 0,20 juta orang dibandingkan kondisi di bulan Maret 2022.

Meski pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2022 cukup mengesankan, yakni 5,72% dan inflasi relatif terkendali di 5,5%. Namun, karena tekanan geopolitik masih belum teratasi, dan bahkan tengah mengancam kelangsungan kondisi perekonomian sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok, maka diperkirakan imbasnya cepat atau lambat akan terasah di tanah air.

Bank Dunia memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2023 hanya 1,7%, turun dari proyeksi sebelumnya 2,9%. Presiden berharap, APBN 2023 dapat menjadi *shock absorber*, yakni menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberi dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural.

Cuma yang menjadi masalah adalah sejauh mana daya tahan atau kemampuan APBN kita untuk menjalankan peran sebagai *shock absorber* yang benar-benar efektif?

Pertanyaan ini perlu dikaji lebih mendalam agar harapan yang terlalu tinggi menggantungkan pada peran APBN tidak berubah menjadi bumerang yang malah merugikan masa depan Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Faktor yang menjadi penyebab angka kemiskinan di Indonesia kembali naik, sudah barang tentu sangat kompleks. Namun demikian, salah satu yang utama sesungguhnya adalah penyesuaian harga BBM pada 3 September 2022 untuk jenis Pertalite, Solar dan Pertamax yang kemudian melahirkan efek domino ke berbagai bidang. Selain itu, inflasi pada September 2022 sebesar 1,17% secara bulanan dan 5,95% secara tahunan juga menyumbang terjadinya kenaikan penduduk miskin.

Secara statistik, angka pertumbuhan ekonomi selama tahun 2022 sebetulnya tergolong baik. Tetapi, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2022, yaitu sebesar 1,81%



Bagong Suyanto,
Dekan Fkip Universitas Airlangga

dan penurunan konsumsi ritel rumah tangga pada periode yang sama, yakni turun 0,11%, ditengarai merupakan imbas dari kebijakan kenaikan harga BBM yang menyebabkan angka kemiskinan kembali naik.

Masyarakat yang dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan hidup sehari-hari, akhirnya mengalami penurunan kemampuan daya beli. Konsumsi yang digadag-gadang menjadi pencegah terjadinya resesi ekonomi di Indonesia, dalam beberapa

tekanan kebutuhan hidup. Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, insentif tenaga kesehatan, subsidi listrik, serta banyak lainnya telah digulirkan agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini adalah program khusus untuk menanggulangi pandemi yang terdiri dari enam sektor, dengan jumlah dana alokasi yang sebesar Rp 695,2 triliun.

Dalam batas-batas tertentu, berbagai program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah memang terbukti dapat memperpanjang nafas dan daya tahan keluarga miskin menghadapi tekanan krisis. Namun demikian, karena substansi program yang bersifat amal-karitatif, maka efektivitasnya pun seringkali masih menjadi tanda tanya.

Mungkin benar, dengan menjadi kelompok sasaran dan target program, keluarga miskin yang memperoleh bantuan akan dapat memperpanjang nafasnya. Masalahnya adalah sejauh mana kemampuan APBN dapat terus diandalkan untuk membiayai program-program populis yang sifatnya

tahunnya. Ketika program bantuan sosial dihentikan, bukan tidak mungkin mereka justru menjadi lebih rentan dan menjadi rawan terjerumus dalam perangkap kemiskinan kronis.

Subjek pembangunan

Nah, Presiden Jokowi telah menargetkan, tingkat kemiskinan tahun 2023 berada di kisaran 7,5%-8,5%. Angka yang dikemukakan presiden ini lebih kecil dari target APBN yang dipatok di kisaran 8,5%-9% di Undang-Undang (UU) APBN 2023.

Pemerintah optimistis dapat mencapai target yang ditetapkan tahun 2023 ketika sasaran program bisa divalidasi melalui survei Registrasi Sosial Ekonomi (Reg-sosok) dari BPS, pengelontoran program bantuan sosial, dan juga program desa yang tepat.

Selain itu, dukungan dari APBD diharapkan juga dapat memperkuat dan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan yang dikembangkan. Di luar validasi data, untuk memastikan agar program pengentasan kemiskinan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah keberanian pemerintah untuk tidak hanya berhenti pada program yang sifatnya amal-karitatif.

Banyak penelitian telah membuktikan bahwa efektivitas dan kelangsungan manfaat dari program pengentasan kemiskinan yang digulirkan sebetulnya adalah pada substansi program yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan.

Berbeda dengan program yang sifatnya amal-karitatif yang malah berpotensi melahirkan ketergantungan, program yang berorientasi pada pemberdayaan umumnya lebih berkelanjutan dan mendukung perkembangan potensi swakarsa masyarakat.

Sudah barang tentu program yang digulirkan bukan berupa paket-paket bantuan yang *top-down*, melainkan lebih banyak berupa program yang sifatnya kontekstual dan empatik kepada kebutuhan riil masyarakat miskin itu sendiri sebagai subjek pembangunan.

Memastikan manfaat APBN untuk pengentasan kemiskinan nisanya akan lebih terjamin jika pemerintah bersedia mengubah orientasi program pembangunan agar tidak terkontaminasi kepentingan politik. APBN hanya akan memberikan manfaat yang nyata jika pemerintah mau bersikap empatik kepada persoalan dan kebutuhan masyarakat miskin. ■

